



PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN

**RENCANA KERJA ANGGARAN
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
(RKA - PPKD)**

TAHUN ANGGARAN 2018

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH:

- a. NAMA : dr. Bahrhun Abbas, MPH
- b. NIP : 19670909 199509 1 001
- c. JABATAN : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Kode	Nama Formulir
RKA PPKD	Ringkasan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
RKA PPKD 1	Rincian Anggaran Pendapatan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
RKA PPKD 2.1	Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
RKA PPKD 3.1	Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah
RKA PPKD 3.2	Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah

	RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH		Formulir RKA - PPKD
	PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN ANGGARAN 2018		
Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pejabat Pengelola Keuangan Daerah			
Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	
1	2	3	
4.	PENDAPATAN	1.029.294.829.732,74	
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	20.971.640.494,21	
4.1.3.	PENDAPATAN HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	6.081.708.668,04	
4.1.3.01.	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMDA (DEVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	6.081.708.668,04	
4.1.3.01.01.	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada Perusahaan Daerah/BUMD	6.081.708.668,04	
4.1.4.	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	14.889.931.826,17	
4.1.4.03.	PENERIMAAN JASA GIRO	10.928.368.652,81	
4.1.4.03.01.	Jasa Giro Kas Daerah	10.928.368.652,81	
4.1.4.05.	TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH	437.475.675,72	
4.1.4.05.01.	Kerugian Uang daerah	437.475.675,72	
4.1.4.19.	LAIN-LAIN PAD YANG SAH LAINNYA	3.524.087.497,64	
4.1.4.19.01.	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	3.524.087.497,64	
4.2.	DANA PERIMBANGAN	901.216.766.000,00	
4.2.1.	DANA BAGI HASIL PAJAK/BAGI HASIL BUKAN PAJAK	83.533.157.000,00	
4.2.1.01.	BAGI HASIL PAJAK	38.831.634.000,00	
4.2.1.01.01.	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	34.471.219.000,00	
4.2.1.01.04.	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21	4.360.415.000,00	
4.2.1.02.	BAGI HASIL BUKAN PAJAK/SUMBER DAYA ALAM	44.701.523.000,00	
4.2.1.02.02.	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan	23.741.357.000,00	
4.2.1.02.06.	Bagi Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan	943.027.000,00	
4.2.1.02.08.	Bagi Hasil dari Gas bumi dan Minyak Bumi	35.948.000,00	
4.2.1.02.12.	Bagi Hasil dari Mineral Batuan	19.981.191.000,00	
4.2.2.	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	616.493.956.000,00	
4.2.2.01.	DANA ALOKASI UMUM	616.493.956.000,00	
4.2.2.01.01.	Dana Alokasi Umum	616.493.956.000,00	
4.2.3.	DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)	137.310.000.000,00	
4.2.3.01.	DANA ALOKASI KHUSUS	137.310.000.000,00	
4.2.3.01.01.	Dana Alokasi Khusus Reguler	45.574.000.000,00	
4.2.3.01.02.	Dana Alokasi Khusus Penugasan	83.862.000.000,00	
4.2.3.01.03.	Dana Alokasi Khusus Afirmasi	7.874.000.000,00	
4.2.4.	DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) NON FISIK	54.629.653.000,00	
4.2.4.01.	DAK NON FISIK	54.629.653.000,00	
4.2.4.01.01	Tunjangan Guru Non Sertifikasi	1.563.000.000,00	
4.2.4.01.02.	Tunjangan Guru Sertifikasi	24.092.428.000,00	
4.2.4.01.03.	Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	3.003.600.000,00	
4.2.4.01.04.	Bantuan Operasional Kesehatan	9.649.751.000,00	
4.2.4.01.05.	Akreditasi Puskesmas	750.000.000,00	
4.2.4.01.06.	Jaminan Persalinan	2.853.340.000,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
1	2	3
4.2.4.01.07.	Bantuan Operasional KB	2.921.290.000,00
4.2.4.01.08.	Tunjangan Khusus Guru	8.898.253.000,00
4.2.4.01.09.	Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	897.991.000,00
4.2.5.	DANA INSENTIF DAERAH.	9.250.000.000,00
4.2.5.01.	DANA INSENTIF DAERAH..	9.250.000.000,00
4.2.5.01.01.	Dana Insentif Daerah	9.250.000.000,00
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	107.106.423.238,53
4.3.3.	DANA BAGI HASIL PAJAK DARI PROVINSI DAN PEMERINTAH DAERAH LAINNYA	105.606.423.238,53
4.3.3.01.	DANA BAGI HASIL PAJAK DARI PROVINSI	21.124.214.238,53
4.3.3.01.01.	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	21.124.214.238,53
4.3.3.04.	ALOKASI DANA DESA	84.482.209.000,00
4.3.3.04.01.	Alokasi Dana Desa (ADD)	84.482.209.000,00
4.3.5.	BANTUAN KEUANGAN	1.500.000.000,00
4.3.5.01.	BANTUAN KEUANGAN DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI LAINNYA	1.500.000.000,00
4.3.5.01.01.	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi	1.500.000.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	1.029.294.829.732,74
5.	BELANJA	209.802.185.749,54
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	209.802.185.749,54
5.1.3.	BELANJA SUBSIDI	1.800.000.000,00
5.1.3.01.	BELANJA SUBSIDI	1.800.000.000,00
5.1.3.01.03.	Belanja Subsidi kepada Pihak Ketiga Lainnya	1.800.000.000,00
5.1.4.	BELANJA HIBAH	40.407.133.800,00
5.1.4.01.	BELANJA HIBAH KEPADA PEMERINTAH	32.519.319.800,00
5.1.4.01.02.	Belanja Hibah Kepada Organisasi Pemerintah	32.519.319.800,00
5.1.4.05.	BELANJA HIBAH KEPADA ORGANISASI KEMASYARAKATAN	4.677.036.000,00
5.1.4.05.01.	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	4.677.036.000,00
5.1.4.06.	BELANJA HIBAH DANA BOS UNTUK SATUAN PENDIDIKAN	3.210.778.000,00
5.1.4.06.01.	Belanja Hibah Dana BOS ke Satuan Pendidikan Dasar Swasta	150.302.000,00
5.1.4.06.02.	Belanja Hibah Dana BOS ke Satuan Pendidikan Menengah Pertama Swasta	146.876.000,00
5.1.4.06.04	Belanja Hibah Dana BOS ke Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Swasta	2.913.600.000,00
5.1.5.	BELANJA BANTUAN SOSIAL	443.897.200,00
5.1.5.01.	BELANJA BANTUAN SOSIAL KEPADA ORGANISASI SOSIAL KEMASYARAKATAN	118.897.200,00
5.1.5.01.01.	Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan	118.897.200,00
5.1.5.03.	BELANJA BANTUAN SOSIAL KEPADA ANGGOTA MASYARAKAT	325.000.000,00
5.1.5.03.01.	Belanja Bantuan Sosial kepada Anggota Masyarakat yang Tidak direncanakan	250.000.000,00
5.1.5.03.02.	Bantuan Sosial untuk Peningkatan Pendidikan	75.000.000,00
5.1.6.	BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA	6.300.000.000,00
5.1.6.03.	BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA PEMERINTAHAN DESA	6.300.000.000,00
5.1.6.03.01.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa	6.300.000.000,00
5.1.7.	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA, PEMERINTAHAN DESA DAN PARTAI POLITIK	157.757.772.300,00
5.1.7.01.	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI	245.000.000,00
5.1.7.01.01.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi....	245.000.000,00
5.1.7.03.	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA	156.793.820.300,00
5.1.7.03.01.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa	156.793.820.300,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
1	2	3
5.1.7.04.	BELANJA BANTUAN KEPADA PARTAI POLITIK	718.952.000,00
5.1.7.04.01.	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik....	718.952.000,00
5.1.8.	BELANJA TIDAK TERDUGA	3.093.382.449,54
5.1.8.01.	BELANJA TIDAK TERDUGA	3.093.382.449,54
5.1.8.01.01.	Belanja Tidak Terduga	3.093.382.449,54
	JUMLAH BELANJA	209.802.185.749,54
	SURPLUS/(DEFISIT)	819.492.643.983,20
6.	PEMBIAYAAN	60.378.505.608,89
6.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	66.878.505.608,89
6.1.1.	PENGUNAAN SILPA	66.878.505.608,89
6.1.1.02.	SILPA DAU/PAD	66.878.505.608,89
6.1.1.02.01.	SILPA Dana Alokasi Umum / Pendapatan Asli Daerah	66.878.505.608,89
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	66.878.505.608,89
6.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	6.500.000.000,00
6.2.2.	PENYERTAAN MODAL/INVESTASI PEMERINTAH DAERAH	6.500.000.000,00
6.2.2.02.	PENYERTAAN MODAL PADA BUMD	6.500.000.000,00
6.2.2.02.01.	Penyertaan Modal pada BUMD	6.500.000.000,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	6.500.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETO	60.378.505.608,89

Kuala Pembuang, 27 Nopember 2017
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

dr. Bahrn Abbas, MPH
NIP. 19670909 199509 1 001